

## SEJARAH ISLAM DAN POLITIK DI AFGHANISTAN

Muhammad Farih Fanani<sup>1\*</sup>, Adetia Andri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sejarah Peradaban Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
email: muhammadfarihf@gmail.com

### Abstrak

Afghanistan merupakan negara di Asia yang memiliki sejarah panjang. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, Afghanistan mengalami masa kelam. Pemerintahan mereka diintervensi oleh negara asing. Lebih dari itu, Afghanistan sempat dikuasai oleh kelompok ekstrimis yaitu Taliban. Taliban menguasai Afghanistan dan menguasai sebagian besar wilayah Afghanistan, sehingga membuat Afghanistan menjadi negara yang rawan konflik. Bahkan Afghanistan menduduki peringkat dua terbawah sebagai negara yang rentan akan konflik. Hal itu disebabkan oleh berbagai macam hal. Namun, usaha untuk modernisasi Afghanistan tidaklah berhenti. Proses modernisasi berjalan bersama dengan demokratisasi. Meskipun masih terdapat kekurangan di berbagai sektor seperti Hak Asasi Manusia, kesetaraan gender, kebebasan pers, dan lain sebagainya, Afghanistan telah menuju jalan yang benar. Artikel ini membahas mengenai sejarah Islam dan politik di Afghanistan, meliputi perjalanan dalam mendirikan negara, usaha modernisasi, dan harapan demokratisasi di Afghanistan. Artikel ini menggunakan metode sejarah dan pendekatan politik, sehingga akan mampu melihat peristiwa sejarah dan politik di Afghanistan dari sudut pandang politik.

Kata Kunci: sejarah, demokratisasi, politik, Islam.

### Abstract

*Afghanistan is a country in Asia that has a long history. In the late 20th and early 21st centuries, Afghanistan experienced dark times. Their government was intervened by a foreign country. Moreover, Afghanistan was once controlled by the extremist group, namely the Taliban. The Taliban control Afghanistan and control most of Afghanistan, making Afghanistan a conflict-prone country. Even Afghanistan is ranked in the bottom two as a country that is prone to conflict. It was caused by various things. However, efforts to modernize Afghanistan have not stopped. The modernization process goes hand in hand with democratization. Even though there are still shortcomings in various sectors such as Human Rights, gender equality, press freedom, etc., Afghanistan is on the right path. This article discusses the history of Islam and politics in Afghanistan, including the journey in establishing a state, modernization efforts, and hopes for democratization in Afghanistan. This article uses a historical method and a political approach, so that it will be able to see historical and political events in Afghanistan from a political point of view.*

*Keywords: history, democratization, politic, Islam.*

### A. PENDAHULUAN

Pada abad ke-20 hingga ke-21, negara Islam Timur Tengah tidak pernah luput dari perbincangan mengenai konflik. Mulai dari konflik internal hingga konflik eksternal. Ini berbanding terbalik dengan negara Barat yang sedang mencapai puncak keemasannya dengan

berbagai macam teknologi yang berhasil mereka temukan. Negara di Timur Tengah, terutama negara Islam justru mengalami masa kelam yang berkepanjangan. Dari Palestina, Sudan, Pakistan, hingga Afghanistan. Sebagaimana negara-negara tersebut, sejarah panjang Afghanistan juga berkaitan erat dengan ketegangan dan pertempuran. Konflik Afghanistan terjadi sejak ratusan tahun yang lalu dimulai Pada tahun 330 S.M. sampai abad ke-7 Masehi di bawah kekuasaan Alexander Agung.<sup>1</sup>

Islam masuk ke Afghanistan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Ketika itu, seorang panglima bernama Sa'ad bin Ash berhasil menaklukkan wilayah Khurasan. Khurasan merupakan daerah yang berada di wilayah Iran, Afghanistan, dan beberapa negara bekas Uni Soviet. Islam masuk ke Afghanistan terjadi pada tahun 647 M. Di wilayah Afghanistan, Islam mulai mengakar kuat ketika sebuah dinasti kecil bernama Ghaznawiyah menguasai wilayah tersebut. Dinasti tersebut berkuasa pada tahun 366-582 M. Wilayah kekuasaannya meliputi Afghanistan dan Punjab.<sup>2</sup>

Daerah yang dahulunya disebut Khurasan tersebut terdapat seorang raja bernama Nadhir Syah. Ia berhasil menaklukkan seluruh wilayah Afghanistan yang menjadi modal untuk membentuk sebuah negara Afghanistan saat ini. Ia wafat pada 1747 M. dan digantikan oleh seorang bernama Ahmad Syah Durrani. Durrani merupakan sebuah gelar yang memiliki arti mutiaranya mutiara. Ia mengawali berdirinya sebuah politik dinasti di Afghanistan dengan memberikan kekuasaan Afghan kepada keturunannya. Dinasti Durrani melangsungkan agenda politiknya di Kabul. Namun, setelah itu, pada 1819, Dost Muhammad berhasil mengusir keturunan Durrani dari Kabul dan mengambil alih wilayah tersebut. Dua puluh tahun kemudian, ia menobatkan diri sebagai Amir Kabul.<sup>3</sup> Beberapa tahun setelahnya terjadi peperangan antara Inggris dengan Keamiran Afghanistan. Peristiwa itu berlangsung antara tahun 1839 sampai 1842, dan menimbulkan kekacauan di Kabul.<sup>4</sup>

Pada tahun 1933, Muhammad Zahir Syah berhasil naik menjadi raja di Afghanistan, ia kemudian mengangkat Muhammad Daud sebagai perdana menteri. Daud merupakan seorang kader komunis. Pengangkatan Daud tersebut rupanya sedikit banyak diintervensi oleh kekuatan besar dari luar, yaitu negara Uni Soviet. Hal tersebut kemudian memicu

---

<sup>1</sup> H Syarifuddin, "Islam Modern Di Afghanistan," *Istiqra'* 4, no. 1 (2016): 61.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> CE Bosworth, *Dinasti-Dinasti Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 1993), 239-240.

<sup>4</sup> Antoinette Burton, "On the First Anglo-Afghan War, 1839-42: Spectacle of Disaster," *Branch*, accessed August 9, 2021, [http://www.branchcollective.org/?ps\\_articles=antoinette-burton-on-the-first-anglo-afghan-war-1839-42-spectacle-of-disaster](http://www.branchcollective.org/?ps_articles=antoinette-burton-on-the-first-anglo-afghan-war-1839-42-spectacle-of-disaster).

kemarahan dari kelompok Islam di Afghanistan. Kemarahan tersebut pada akhirnya memicu konflik yang berkepanjangan di wilayah tersebut.<sup>5</sup>

Setelah itu, Afghanistan menjadi salah satu negara yang tidak pernah berhenti untuk berkonflik. Terlebih ketika berada di bawah pemeritahan Taliban. Upaya binadamai dan modernisasi Afghanistan hingga kini terus dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk membawa Afghanistan menuju negara yang ideal dan maju secara sosial dan politik. Unsur-unsur yang biasa dipakai untuk menandai majunya sebuah negara meliputi beberapa hal, antara lain: sistem politik, HAM, kesetaraan gender, kebebasan berbicara, perkembangan ekonomi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, parameter untuk menilai sebuah majunya sebuah negara akan menjadi semakin jelas.

Dalam masa satu abad terakhir, Islam di Afghanistan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Afghanistan menjadi salah satu negara di Asia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Sejarah panjang yang dilalui oleh kelompok Islam di Afghanistan memiliki dampak yang cukup signifikan dalam membentuk masyarakat Afghanistan abad modern. Indikasinya adalah kuatnya gerakan Islamis yang tumbuh di negara tersebut. Mesir dan Pakistan memiliki pengaruh yang kuat perihal gerakan Islamis di Afghanistan. Menguatnya gerakan Islamis tersebut dianggap sebagai kekuatan yang membahayakan dan mengancam eksistensi Barat. Anggapan inilah yang kemudian membuat negara-negara Islam di Timur Tengah rawan sekali konflik.

Artikel ini akan membahas tiga persoalan pokok yang penting untuk ditelisik lebih jauh. Yaitu pertama, sejarah Islam di Afghanistan, mulai dari masuk hingga berkembangnya. Kedua, membahas mengenai Taliban di Afghanistan, meliputi sejarah Taliban dan kondisi Afghanistan di bawah gerakan Taliban. Ketiga, membahas mengenai modernisasi yang dilakukan Afghanistan, mulai dari usaha modernisasi ekonomi, hingga demokratisasi. Lika-liku sejarah Afghanistan yang bisa dianggap kelam tersebut memaksa pemerintah Afghanistan untuk aktif membenahi negara mereka sedikit demi sedikit. Maka dari itu, sejarah Islam dan upaya pembenahan yang dilakukan oleh Afghanistan menjadi menarik untuk dikaji. Artikel ini akan membahas mengenai sejarah politik Islam di Afghanistan dan modernisasi yang dilakukan Afghanistan pada abad modern.

Pembahasan pertama bertujuan untuk mengungkap perjalanan panjang serta lika-liku Afghanistan mulai dari masuknya Islam ke negara tersebut, menguatnya gerakan Islamis, hingga kelahiran negara Republik Afghanistan. Pembahasan kedua bertujuan untuk

---

<sup>5</sup> Syarifuddin, "Islam Modern Di Afghanistan," 62.

memaparkan sejarah Taliban dan kondisi Afghanistan ketika berada di bawah kekuasaan Taliban. Pembahasan ketiga bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya modernisasi yang dilakukan di Afghanistan, meliputi demokratisasi Afghanistan dan analisis tentang tantangan serta harapan demokratisasi di Afghanistan. Ketiga pembahasan historis tersebut akan dikaji dengan menggunakan cara pandang tertentu untuk mendapatkan uraian historis yang spesifik, cara pandang tersebut adalah politik. Hal ini wajar, terlebih bahwa ilmu sejarah dan ilmu politik memiliki hubungan yang cukup erat. Sejarah politik berkaitan erat dengan sejarah kekuasaan atau *history of power*.<sup>6</sup> Berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dikaji dalam artikel ini, cara pandang politik akan berguna untuk mendapatkan penjelasan secara menyeluruh tentang sebuah peristiwa politik dalam sejarah Islam di Afghanistan.

Penelitian-penelitian terdahulu terkait sejarah di Afghanistan sudah banyak. Sebagian besar penelitian tersebut membahas mengenai Afghanistan dan Taliban. Afghanistan adalah sebuah negara yang berdiri sendiri ketika Taliban tidak berkuasa. Sebelum Taliban kembali mengambil alih negara tersebut, Afghanistan memiliki sejarah panjang dan berupaya untuk mengubah negara yang rawan konflik tersebut menjadi negara maju. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, penjabaran mengenai Afghanistan melingkupi sejarah Islam, politik, dan modernisasi. Namun, dalam kajian ini ruang lingkup pembahasannya meliputi tantangan, harapan, dan demokratisasi di Afghanistan. Hal tersebut penting karena sebagai salah satu negara Islam yang demokratis, unsur-unsur demokratisasi dalam ranah politik (di Afghanistan) juga penting untuk ditelisik lebih jauh. Hal ini yang belum banyak di bahas pada penelitian-penelitian terdahulu.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Penelitian Terdahulu**

Tinjauan pustaka berguna untuk mengetahui posisi sebuah penelitian di tengah banyaknya penelitian terdahulu yang sejenis. Banyak penelitian yang membahas mengenai Afghanistan, akan tetapi penulis menghadirkan empat jurnal dengan penelitian sejenis yang bisa dipakai untuk mengetahui posisi artikel jurnal ini di tengah-tengah banyaknya penelitian tentang Afghanistan. Dua artikel jurnal dari dalam negeri dan dua sisanya dari luar negeri. Artikel jurnal berjudul “Islam Modern di Afghanistan” yang ditulis oleh H. Syarifuddin, dalam jurnal *Istiqra*<sup>7</sup> berisi tentang sejarah Islam yang ada di Afghanistan. Membahas mulai dari masuknya Islam ke Afghanistan, hingga sejarah Islam pada masa

---

<sup>6</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 176.

<sup>7</sup> Syarifuddin, “Islam Modern Di Afghanistan,” 60.

modern di Afghanistan, termasuk sistem politik yang berlaku di Afghanistan. Artikel jurnal yang ditulis oleh Aly Ashghor berjudul “ Taliban di Afghanistan: Tinjauan Ideologi, Gerakan dan Aliansinya dengan Isis”, dalam *Jurnal Keamanan Nasional*<sup>8</sup>, juga hanya menyinggung mengenai sejarah Taliban yang berkuasa di Afghanistan. Artikel jurnal ketiga ditulis oleh S. Yaqub Ibrahimy berjudul “ Afghanistan’s Political Development Dilemma: The Centralist State Versus a Centrifugal Society”, dalam *Journal of Aouth Asian Development*.<sup>9</sup> Artikel jurnal keempat ditulis oleh Tilmann J. Roder, berjudul “Complementarity and Conflict: State, Islamic, and Customary Justice in Afghanistan”, dalam *Journal of Afghan Legal Studies*.<sup>10</sup>

Keempat artikel jurnal di atas memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Artikel pertama dan kedua membahas Afghanistan terutama ketika di bawah kekuasaan Taliban. Penelitian di atas tidak menampakkan bagian demokratisasi Afghanistan. Hal ini yang menjadi titik lemah dari artikel jurnal di atas, sehingga dalam kajian ini, demokratisasi dan modernisasi di Afghanistan menjadi hal yang unik. Selain itu, kajian ini tidak hanya membahas sejarah Afghanistan dalam masa lampau yang panjang, akan tetapi juga membahas modernisasi, demokratisasi, dan tantangan demokrasi di Afghanistan pada masa kontemporer. Poin tersebut yang tidak banyak dibahas pada penelitian-penelitian terdahulu.

Artikel ketiga banyak membahas mengenai Afghanistan setelah Taliban. Proses membangun sebuah negara yang masih rapuh antara masyarakat dan pemerintahannya. Artikel tersebut mencari hubungan antara politik sentral dan masyarakat Afghanistan. Namun, dalam artikel jurnal tersebut tidak membahas mengenai sejarah Islam, modernisasi, dan demokratisasi di Afghanistan, sebagaimana yang dibahas dalam artikel jurnal ini. Artikel jurnal keempat banyak membahas tentang hukum di Afghanistan, khususnya hukum yang berlaku pada masa kontemporer. Artikel jurnal tersebut tidak membahas mengenai modernisasi dan demokratisasi di Afghanistan. Hal ini yang membedakan antara artikel jurnal di atas dengan kajian ini. Artikel jurnal ini fokus membahas tentang sejarah Islam dan politik di Afghanistan. Tidak hanya sebatas itu, kajian ini juga menyajikan uraian tentang fakta-fakta yang ada dalam sebuah negara demokrasi, melingkupi HAM, keadilan gender, dan kebebasan pers, dan hak minoritas di Afghanistan.

---

<sup>8</sup> Aly Ashghor, “Taliban Di Afghanistan: Tinjauan Ideologi, Gerakan Dan Aliansinya Dengan Isis,” *Jurnal Keamanan Nasional* II, no. 1 (2021): 71.

<sup>9</sup> S Yaqub Ibrahimy, “Afghanistan ’ s Political Development Dilemma : The Centralist State Versus a Centrifugal Society” (2019).

<sup>10</sup> Tilmann J. Roder, “Complimentarity and Conflict: State, Islamic, and Customary Justice in Afghanistan,” *Journal of Afghan Legal Studies* 2 (2017): 213.

## 2. Politik Afghanistan

Ketika sejarah sosial belum populer, ilmu sejarah sangat erat kaitannya dengan peristiwa politik. Sejarah adalah politik masa lalu, dan politik adalah sejarah masa depan. Sejarah merupakan sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lampau, sedangkan politik memiliki definisi yang berbeda-beda, akan tetapi pada umumnya politik berkaitan dengan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan negara dan pemerintahan. Politik menaruh perhatian pada gejala-gejala masyarakat seperti kekuasaan, kepentingan partai politik, kebijakan, konsensus, dan lain sebagainya.<sup>11</sup> Sebuah peristiwa masa lampau yang dikaji dengan menggunakan sudut pandang politik berarti sejarah politik. Sebuah sejarah yang menggunakan ilmu politik dan unsur-unsur politik sebagai bahan atau cara pandang untuk menghasilkan penjelasan yang lebih menyeluruh dan kompleks.

Sejarah Islam mengalami perubahan dari masa ke masa. Dekade tahun 1970-an menandai suatu masa terjadinya transformasi dan reorientasi bagi dunia Islam. John Obert Voll menyebutkan bahwa transformasi dan reorientasi ini merupakan sebuah kebangkitan yang merupakan produk dari perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat modern dan kelangsungan dari dunia Islam.<sup>12</sup>

Pada awalnya, ideologi-ideologi impor yang hadir di dunia Islam dipandang akan mengubah struktur keagamaan secara tradisional. Hal ini juga yang diprediksi menjadi suatu bentuk pemisahan antara agama dan wilayah publik, atau yang lebih dikenal sebagai sekularisme. Padahal pengalaman Barat tentang sekularisme membuktikan bahwa pengaruh ini tidak serta-merta menghilangkan pengaruh agama di ruang-ruang publik dan kehidupan politik.<sup>13</sup>

Sulistyo Adi mencatat<sup>14</sup> hubungan AS dengan Afghanistan dimulai pada tahun 1952. Sejak tahun itu, Amerika Serikat semakin aktif “berwisata” di negara-negara semacam Iran atau Pakistan. Hadirnya AS di negara-negara itu membuat khawatir Uni Soviet. Namun beruntung bagi Soviet melihat ikatan hubungan Amerika Serikat dan Afghanistan tak seerat yang bisa dibayangkannya. Afghanistan tidak pernah berhenti mengalami pergolakan, sehingga tidak ada kestabilan baik itu dari sisi keamanan, politik, sosial, maupun ekonomi. Sepanjang abad ke-16 hingga abad ke-21 terjadi peperangan hingga

---

<sup>11</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, 173.

<sup>12</sup> John Obert Voll, *Islam Continuity and Change in The Modern* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 347.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 348.

<sup>14</sup> Sulistyo Adi, “Mengenal Afghanistan,” *Al Jamiah* (1988): 56.

turun temurun berebut kekuasaan, mulai dari perang antar suku di Afghanistan hingga perang dengan negara lain seperti Inggris, Uni Soviet dan Amerika Serikat.

Sejarah politik Afghanistan tidak akan pernah habis untuk dibahas. Terlebih dalam perjalanan panjangnya, Afghanistan mengalami banyak sekali problem yang hingga kini pun tidak kunjung selesai. Sejarah Islam di Afghanistan merupakan sebuah penelitian yang mengkaji tentang peristiwa masa lampau di Afghanistan dilihat dari kacamata politik. Dengan memperhatikan berbagai aspek seperti pembentukan negara tersebut, agama yang dianut, sistem politik yang dipakai, tantangan dalam menjalankan sistem politik tersebut, dan beragam konflik yang terjadi di sebuah negara tersebut.

Pergerakan Islam umumnya lebih sering dijelaskan dalam bentuk sebuah jaringan intelektual yang saling berkait.<sup>15</sup> Hal inilah yang terbukti muncul di Afghanistan. Harus diakui bahwa (juga telah disebutkan) Afghanistan bukanlah satu-satunya negeri, pada periode pertengahan abad kedua puluh, yang mengalami gejolak konfrontasi antara Islam dan Barat (termasuk Soviet). Di dunia Islam lain, seperti Islam di Mesir, pada waktu itu juga sedang mengalami gejolak dalam negeri. Maka kemunculan sebuah pergerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir memperjelas adanya semangat perlawanan terhadap rezim sekuler, yang disponsori Barat secara langsung maupun ideologis. Ghulam Muhammad Niazi yang pernah berada di Kairo untuk studinya pada tahun 1950-an, terinspirasi oleh pergerakan-pergerakan layaknya Ikhwanul Muslimin (Muslim Brotherhood).

### C. METODE PENELITIAN

Jenis kajian ini merupakan kajian sejarah politik, dengan menggunakan data-data pustaka sebagai rujukan untuk menyusun bab dan sub bab yang dibahas. Dalam sebuah penelitian, metode penelitian merupakan aspek yang sangat penting. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan uraian yang sistematis dan kronologis. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode sejarah, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan politik. Dalam penelitian sejarah, pendekatan berfungsi untuk melihat sebuah peristiwa sejarah dari kacamata tertentu, dalam hal ini adalah politik.<sup>16</sup>

Metode sejarah menggunakan empat langkah dalam penelitian sejarah yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Historiografi berarti pengumpulan sumber. Tahap ini

---

<sup>15</sup> Ira M Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam* (Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada, 2000), 101.

<sup>16</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, 2nd ed. (Yogyakarta: Ombak, 2019), 4.

merupakan langkah yang penting karena rekonstruksi masa lampau selalu berkaitan erat dengan sumber yang ditemukan.<sup>17</sup> Tahap kedua adalah kritik sumber atau verifikasi. Kritik dilakukan untuk mencari keabsahan sumber yang telah ditemukan.<sup>18</sup> Tahap ketiga adalah interpretasi. Tahap ini terdapat dua metode yaitu analisis dan sintesis dengan menggunakan alat analisis yang digunakan. Tahap keempat sekaligus yang terakhir adalah historiografi. Historiografi adalah usaha merekonstruksi masa lampau setelah dilakukan penelitian.<sup>19</sup> Historiografi bisa juga diartikan sebagai laporan sejarah.

Adapun pendekatan yang dipakai adalah pendekatan politik. Pendekatan politik berfungsi untuk memandang sebuah peristiwa dari sudut pandang politik. Terutama terkait sistem politik, kedudukan agama dalam politik, hak asasi manusia, kedudukan minoritas, serta masa depan sistem politik (demokrasi) dalam sebuah negara. Politik merupakan tulang punggung sejarah. Sejarah politik bersinggungan dengan berbagai maca peristiwa tentang para raja, negara, bangsa, pemerintahan, parlemen, pemberontakan, kelompok-kelompok kepentingan, dan interaksi antar kekuatan tersebut dalam memperbutkan kekuasaan.<sup>20</sup>

Pendekatan politik meliputi beberapa aspek, pertama, tradisional (*tradisional approach*). Negara menjadi fokus utama dengan menonjolkan segi konstitusional dan yuridis. Bahasan pendekatan ini menyangkut sifat Undang-Undang Dasar serta kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan lembaga-lembaga kenegaraan formal, badan yudikatif, badan eksekutif, dan lain sebagainya. Karenanya pendekatan ini disebut juga pendekatan institusional atau legal-institusional.<sup>21</sup> Kedua, tingkah laku. Salah satu pemikiran pokok dari pelopor-pelopor pendekatan perilaku adalah bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal karena bahasan itu tidak banyak memberi informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. Sebaliknya, lebih bermanfaat bagi peneliti untuk mempelajari manusia itu sendiri serta perilaku politiknya, sebagai gejala yang benar-benar dapat diamati. Ketiga, pasca perilaku (*post behavioral approach*). Gerakan pasca perilaku memperjuangkan perlunya *relevance and action* (relevansi dan orientasi bertindak).<sup>22</sup>

---

<sup>17</sup> Daliman, *Metode Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2012), 52.

<sup>18</sup> Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2019), 108.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 117.

<sup>20</sup> Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, 174.

<sup>21</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008).

<sup>22</sup> *Ibid.*, 56.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sejarah Islam Dan Politik Afghanistan

Afghanistan merupakan negara yang berada di Benua Asia bagian tengah. Negara Afghanistan berbatasan langsung dengan Pakistan, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, dan Cina. Penduduk Afghanistan memeluk agama Islam, 80 sampai 90 persen beraliran Sunni dan sisanya Syi'ah. Bahasa resmi Afghanistan adalah bahasa Pustun dan Persia. Meskipun demikian, masih banyak bahasa lain yang ada di Afghanistan. Mereka memiliki bahasa Turki, Drawidi, Nuristani, dan lain sebagainya. Masyarakat Afghanistan terbagi dalam perbedaan yang cukup mencolok antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Namun, sebagian besar masyarakatnya hidup di pedesaan dengan bertani atau beternak.<sup>23</sup>

Awalnya, negara Afghanistan berbentuk monarki absolut. Hingga pada awal abad ke-20 raja yang berkuasa di Afghanistan digulingkan melalui sebuah kudeta, kemudian lahirah Negara Republik Afghanistan pada tahun 1973. Kudeta kedua terjadi pada tahun 1978, kudeta tersebut dipelopori oleh Dewan Revolusioner Afghanistan, kelompok ini kemudian mendirikan negara Republik Demokratik Afghanistan. Kekacauan politik internal Afghanistan terus berlanjut, sehingga melahirkan kudeta ketiga yang terjadi pada ketika 1979. Kekacauan tersebut semakin tidak terkendalikan dan diperparah dengan masuknya Uni Soviet ke Afghanistan dan menyebarkan faham komunis di Afghanistan.<sup>24</sup>

Ulama memiliki kedudukan yang tinggi di Afghanistan. Mereka memberikan gelar kepada ulama dengan sebutan Mullah. Ulama selalu ikut memutuskan persoalan strategis bangsa dan negara. Pada abad ke-18 dan 19 para ulama di Afghanistan diberi kepercayaan untuk menyelesaikan sengketa hukum di tengah masyarakat. Hingga pertengahan abad 19, Afghanistan tidak memiliki sekolah umum. Sekolah yang ada saat itu hanya sekolah tradisional yang mengajarkan agama. Rakyat Afghan dikenal fanatik terhadap agama dan sangat menghormati ulamanya. Peran Mullah mulai mencuat dalam struktur pemerintahan Afghanistan semenjak Amir Al- Hadidi Abdurrahman Khan berkuasa di Afghanistan pada 1880-1901.<sup>25</sup>

Di Afghanistan sering terjadi peperangan karena perebutan kekuasaan. Bahkan, sepanjang abad XIV dan XXI terjadi peperangan hingga turun temurun. Mulai dari

---

<sup>23</sup> William Maley, *Taliban Dan Multi Konflik Di Afghanistan* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1999), 23.

<sup>24</sup> Syarifuddin, "Islam Modern Di Afghanistan," 63.

<sup>25</sup> Mustafa Abd Rahman, *Afghanistan Di Tengah Arus Perubahan Lamporan Dari Lapangan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), 19–20.

perang antar suku di Afghanistan bahkan antar negara. Peperang di Afghanistan juga terjadi dengan negara seperti Inggris, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Hal ini terjadi karena masyarakat Afghanistan di juluki sebagai masyarakat tribal (kesukuan) yang sangat kompleks. Hasil dari perjalanan perang dari peperangan tersebut menyebabkan kebangkrutan negara dan kebangkrutan politik. Sehingga menjadikan Afghanistan negara 10 terburuk dunia.<sup>26</sup>

Perang yang berkepanjangan dimulai pada masa kepemimpinan Raja Zhahir Syah (1973), Uni Soviet memberikan wewenang kepada Raja Zhahir Syah agar mengadakan revolusi kebudayaan. Revolusi tersebut untuk menghapus syi'ar Islam yang dijunjung tinggi oleh bangsa Afghanistan dengan menyerang jilbab kaum Muslim. Di sebuah konferensi umum rakyat Afghanistan diumumkan pernyataan yang berbunyi "telah berakhir masa kegelapan untuk selamanya". Pernyataan ini dilontarkan sambil menginjak injak jilbab seseorang wanita muslimah.<sup>27</sup> Revolusi kebudayaan tersebut mendapat penolakan dari penduduk Kandahar. Penduduk Muslim menolak keputusan untuk membuka jilbab dan berusaha mempertahankan syi'ar agama mereka dari tindakan diktaktor Raja Zhahir Syah.<sup>28</sup> Penolakan tersebut menyebabkan pemerintah mengirimkan pasukan ke Khandahar. Pasukan yang dikirim pimpinan oleh Khan Muhammad untuk memaksa kaum wanita Islam di Kandahar membuka jilbabnya. Tindakan militer itu berakhir dengan jatuhnya ratusan syuhada di Kandahar.

Raja Zhahir Syah merupakan boneka dari Uni Soviet. Setelah Raja Zhahir Syah, pemerintahan diteruskan oleh tokoh tokoh komunis. Seperti Nur Muhammad Taraki, Babrak Karmal, dan Hafizullah Amin serta Najbullah. Mereka semua dibina oleh Uni Soviet dan diberikan keleluasaan bergerak. Selama kepemimpinan tokoh tokoh komunis, menimbulkan reaksi atas kerusakan secara sekuler di Afghanistan. Hal ini membangkitkan Ghulam Niazi sebagai penggerak jihad dengan membentuk Serikat Islam untuk membendung arus komunisme. Para mahasiswanya pun membentuk gerakan dengan nama Juanan Muslim (Pemuda Islam) dibawah kepemimpinan Abdurrahman Niazi. Kemudian Juanan Muslim berubah nama menjadi al-Jamiyah al-Islamiyah dan lebih dikenal dengan nama Jami'at e Islam yang diketuai Burhannudin

---

<sup>26</sup> Iwan Hadibroto, *Perang Afghanistan: Di Balik Perseteruan AS & Taliban* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), 76.

<sup>27</sup> Abdullah Azam, *Perang Afghanistan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 56.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 70.

Rabbani.<sup>29</sup> Kemudian dosen Sayyaf dan Robbani diangkat sebagai perlindungan gerakan tersebut.

Pada tahun 1973 arus Islam telah menguasai seluruh Universitas yang ada di Afghanistan. Hal ini membuat Uni Soviet khawatir dan memutuskan untuk menggulingkan Raja Zhahir Syah serta menggantinya dengan Muhammad Daud (1973-1978 M). Pada masa pemerintahan Muhammad Daud, ia berhasil memukul hancur gerakan Islam yang ada. Sayyaf dan Ghulam Niazi ditangkap dan dipenjarakan. Hekmatyar, Rabbani dan pemuda militan lainnya melarikan diri ke Peshawar. Pemerintahan komunis ini terus berlanjut hingga pemerintahan Najibullah 1987-1992 M. Pada 1992 Mujahidin berhasil menjatuhkan pemerintahan Najibullah, yang mana menandakan berakhirnya pemerintahan Komunis di Afghanistan. Mujahidin adalah para pemuda militan yang berhasil kabur ke Peshawar saat pemerintahan Muhammad Daud. Kemudian mereka bangkit kembali melawan komunis dengan gerakan Mujahidin. Gerakan Mujahidin ini dimulai pada pemerintahan Muhammad Taraki, tepatnya 29 April 1978 yang ditandai dengan hancurnya kekuasaan Taraki dan pada Mei 1978 di Herat pun bermunculan perlawanan.

Konflik di Afghanistan merupakan masalah yang sukar untuk dirampungkan. Konflik dari zaman ke zaman tidak pernah ada habisnya. Hal itulah yang membuka peluang bangsa luar untuk menginvasi Afghanistan, khususnya Uni Soviet pada Desember 1979. Rezim komunis Soviet hanya sempat hidup sampai April 1992, di bawah dua penguasa yaitu Babrak Karmal (1979-1986), dan Najibullah (1986-1992). Afghanistan sangat bergantung pada Soviet, sampai pada akhirnya pada 1991 terjadi kudeta di Moskow. Pemberontakan tersebut memberikan dampak pada kondisi perpolitikan Afghanistan. Satu tahun kemudian pada 1992, Najibullah jatuh.<sup>30</sup>

Konstitusi baru disahkan oleh Jirga Loya (Majelis Nasional Agung) tahun 2003 yang menetapkan pemerintahan sebagai satu republik Islam yang terdiri dari tiga cabang, kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang sesuai dengan hukum Islam. Tahun 2004 dilakukan pemilihan presiden oleh Afghanistan yang berjalan relatif aman di mana Hamid Karzai menang dengan 55.4% dari pemilihan suara. Akan tetapi 2009, pemilihan presiden di golongkan sebagai kurang aman dan kredibel, partisipasi pemilihan rendah dan kecurangan pemilihan besar. Pada bulan Agustus 2009, dilakukan pemilihan presiden bersamaan dengan pemilihan-pemilihan untuk

---

<sup>29</sup> Ibid., 56.

<sup>30</sup> Ibid., 25.

420 kursi dewan provinsi, tetapi mengalami kebuntuan politik karena adanya salah perhitungan dan penipuan pemilihan, oleh karenanya pada tanggal 7 November dilakukan pemilihan babak kedua dengan adil dan saling terbuka.

Sistem politik yang legal di Afghanistan adalah berdasarkan campuran sipil dan syiah Islam. Tipe pemerintahan negara ini adalah Republik Islam. Pemimpin negara ini sama seperti pemerintahan di negara demokrasi presidential yakni, presiden sebagai kepala negara juga merangkap sebagai kepala pemerintahan.

## 2. Afghanistan dan Taliban

Afghanistan memiliki beberapa gerakan Islam yang dianggap oleh Barat sebagai terorisme.<sup>31</sup> Pada saat Uni Soviet menjajah Afghanistan mereka membawa paham Komunis, sedangkan Afghanistan adalah sebuah negara yang mayoritasnya beragama Islam. Berdasarkan hal tersebut maka munculah gerakan Islam sebagai upaya untuk melakukan pemberontakan terhadap penjajahan Komunis.<sup>32</sup> Masyarakat Afghanistan yang memiliki corak keIslaman yang konservatif membuat gerakan Islamis semacam itu mampu tumbuh subur dan berkembang di Afghanistan. Terlebih, gerakan konservatif Afghanistan tersebut juga mendapatkan pengaruh dari gerakan-gerakan Islamis luar negeri, seperti Mesir dan Pakistan.

Gerakan Islamis yang paling besar dan memiliki basis massa dan militer yang sangat kuat di Afghanistan adalah Taliban. Taliban berasal dari bahasa Arab yaitu *thalibun*, yang merupakan Isim Fa'il dari kata pelajar. Pada mulanya, Taliban merupakan pelajar-pelajar yang Afghanistan yang sedang menuntut ilmu agama. Taliban mengawali kemunculan dengan mendirikan madrasah-madrasah di provinsi Kandahar hingga di perbatasan selatan Afghanistan-Pakistan merupakan tempat Taliban memulai misinya. Madrasah-madrasah di Afghanistan memiliki posisi khusus di tengah masyarakat sehingga memudahkan Taliban untuk memperluas gerakannya.<sup>33</sup>

Secara ideologi sosok Taliban relatif dapat ditemukan di perbatasan laut Pakistan. Di sana bertebaran para *talib al-ilm* (murid) yang memiliki hubungan dengan pelajar-pelajar teologi di Turki. Mereka tidak hanya muncul di Afghanistan

---

<sup>31</sup> Jhon Afrizal, "Gerakan Sosial Politik Islam Dunia," *Sosial Budaya* 9 (n.d.): 138.

<sup>32</sup> Jana Milia, "Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Kelompok Terorisme Pada Masa Pemerintahan Barack Obama," *Jom Fisip* 2 (2015): 5–6.

<sup>33</sup> Ahda Abid Ghifari, "Dinamika Politik Afghanistan Pada Masa Taliban" (Universitas Negeri Yogyakarta, 2001), 94.

akan tetapi juga ada di Pakistan, dari Partai Ulama Islam pimpinan Ulama Islam Fazlur Rahman. Ia memberikan fasilitas belajar agama berideologi konservatif bagi anak laki-laki dari kamp-kamp pengungsi Afghan, khususnya anak-anak dhuafa. Pendidikan agama di sana memiliki kesamaan (terpengaruh) oleh madzab Deoband, sebuah institusi pendidikan yang didirikan di kota Deoband, India pada tahun 1867. Deoband mengajarkan Islam dengan cara-cara ortodoks. Dalam pandangan Taliban, dosa dan kemungkaran terjadi karena adanya kesalahan dalam penerapan agama. Taliban membentuk satuan pengamanan yang bertugas untuk penegakan amar ma'ruf nahi mungkar.<sup>34</sup>

Kemunculan gerakan Taliban pertama kali pada tahun 1994 ditandai dengan mendirikan madrasah-madrasah di Afghanistan. Kelompok Taliban mayoritasnya berasal dari suku Pustun yang merupakan salah satu suku terbesar di Afghanistan, dan Taliban merupakan sebuah pergerakan dari kelompok Sunni muslim.<sup>35</sup> Taliban berhasil berkembang dengan pesat. Dua tahun setelah pendiriannya mereka mampu mengusir pasukan Mujahidin (yang dipimpin oleh Shah Masood) pada tahun 1996 dari kota Kabul. Setelah itu, satu-persatu kota di Afghanistan pun berhasil dikuasi oleh Taliban, seperti kota Herat di Afghanistan Barat, kota Mezar-e Sharif, dan Kunduz di Afghanistan Utara. Taliban menjadi kelompok yang sangat berkuasa di Afghanistan, mereka menguasai sekitar 90 hingga 95 persen wilayah Afghanistan, sebelum akhirnya digempur oleh pesawat tempur Amerika Serikat pada 7 Oktober 2001.<sup>36</sup>

Dalam wawancara yang dilakukan oleh wartawan Kompas dengan salah satu juru bicara Taliban Mullah Amir Khan Muttaqi, perihal alasan didirikannya Taliban, dikatakan bahwa;

“Setelah faksi-faksi Mujahidin menguasai Kabul tahun 1992, rakyat Afghanistan menduga bahwa keamanan dan perdamaian akan segera terwujud di negeri ini. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, mereka saling bertikai satu sama lain memperebutkan kekuasaan di Kabul. Keadaan negeri ini pun malah terpuruk dalam kehancuran yang jauh lebih parah lagi. Sejumlah pemimpin lokal khususnya di Kandahar, malah saling berlomba memimpin kelompok-kelompok mafia bersenjata yang bersaing satu sama lain yang membuat kejahatan, pencurian, dan pemeriksaan sewenang-wenang. Penyekapan dan

---

<sup>34</sup> Ibid., 29.

<sup>35</sup> Aditia Yulia Estari Sunaryo, “Perubahan Sikap Hamid Karzai Terhadap Taliban Di Afghanistan” (Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), 1.

<sup>36</sup> Rahman, *Afghanistan Di Tengah Arus Perubahan Lamporan Dari Lapangan*, xi–xii.

pemeriksaan terhadap wanita kemudian kaum wanita itu dibunuh, hampir terjadi setiap hari. Sementara usaha PBB, Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan negara-negara Islam, untuk mencari penyelesaian damai tidak kunjung ada hasilnya.”<sup>37</sup>

Islamisme Afghanistan bergantung pada gerakan-gerakan Islam yang lain. Ideologi islamis Afghanistan secara umum diadopsi dari dua gerakan besar yaitu Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Jamaat Islami di Pakistan. Seringkali Islamisme di Afghanistan justru dianggap sebagai anak dari kedua gerakan tersebut. Keduanya sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter dan gerakan kader-kader Islamis di Afghanistan. Kebangkitan Taliban pun demikian. Taliban mendapatkan dukungan dari gerakan fundamentalis yang sangat konservatif dari Pakistan yaitu Jam’iat Ulama Islam.<sup>38</sup>

Taliban tidak memiliki kebijakan luar negeri. Akan tetapi mereka memiliki hubungan erat dengan Pakistan. Taliban merupakan gerakan Afghanistan yang digunakan Pakistan sebagai instrumen. Tujuan-tujuan konstan mereka sejak invasi Soviet adalah menjadikan Afghanistan sebagai negara boneka dengan cara memainkan kartu etnis Pustun dan fundamentalisme Islam. Sementara itu, Taliban merupakan kelompok yang sangat konservatif dan sebagaimana Islamis lainnya, mereka anti-Barat. Mereka juga sangat anti-Syiah. Taliban menekankan penafsiran yang sangat literal terhadap sunnah. Mereka menolak seluruh model budaya Barat, dan menggunakan Islam sebatas hanya aplikasi dari syariah.<sup>39</sup>

Kemunculan dan menguatnya Taliban di Afghanistan merupakan ancaman baru yang tidak kalah mengerikan. Taliban merupakan gerakan Islamis yang berideologi fundamentalis dan menuntut menguasai Afghanistan dengan berbagai macam cara. Taliban sempat menguasai Afghanistan tahun 1996 sampai 2001, sebelum akhirnya dikalahkan oleh Amerika.<sup>40</sup> Setelah itu, Taliban bergerak di bawah tanah. Afghanistan kuat oleh sokongan Amerika dan dari tahun 2002 hingga awal tahun 2021, Afghanistan berhasil sedikit demi sedikit memperbaiki negaranya. Sebelum Afghanistan kembali dikuasi oleh Taliban pada pertengahan 2021, mereka

---

<sup>37</sup> Ibid., 1–2.

<sup>38</sup> Maley, *Taliban Dan Multi Konflik Di Afghanistan*, 205,214.

<sup>39</sup> Ibid., 215.

<sup>40</sup> Rahman, *Afghanistan Di Tengah Arus Perubahan Lamporan Dari Lapangan*, xii.

berangsur-angsur telah berusaha untuk memperbaiki negaranya dengan berbagai cara. Termasuk melakukan modernisasi, termasuk demokratisasi.

### 3. Modernisasi di Afghanistan

Sebelum akhirnya dikuasi oleh Taliban akhir-akhir ini, perlu diketahui juga usaha yang dilakukan oleh Afghanistan dalam menumbuhkan berbagai macam sektor. Sebagaimana negara yang berusaha untuk bangkit dari konflik dan melakukan modernisasi dan demokratisasi, negara Afghanistan pun demikian. Afghanistan melalui *National Democracy Institute* (NDI) melakukan berbagai upaya untuk membangun kembali Afghanistan menjadi sebuah negara yang lebih baik. NDI menyokong adanya partai-partai politik di Afghanistan demi demokrasi yang bisa berjalan dengan baik. Selain itu juga partisipasi golongan perempuan juga menjadi perhatian penting.<sup>41</sup> Upaya-upaya NDI tersebut adalah untuk memastikan proses modernisasi dan demokratisasi di Afghanistan berjalan dengan sempurna.

Proses modernisasi yang terjadi di Afghanistan juga tercermin dari adanya partai-partai politik yang eksis. Di antaranya Partai Persatuan Bangsa Afghanistan, Partai Konsensus Pencerahan Nasional Afghanistan, Partai Persatuan Nasional Afghanistan, Partai Solidaritas Afghanistan, dan lain sebagainya. Partai-partai tersebut selain berpartisipasi dalam demokrasi di Afghanistan, juga mewakili sebuah ideologi masing-masing. Mulai dari Islamisme, sekularisme, hingga feminisme.<sup>42</sup> Hal ini menjadi indikasi bahwa ada upaya bagi Afghanistan untuk memodernisasi negaranya. Selain itu, pemilihan umum di Afghanistan juga perlahan mulai membaik, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan, akan tetapi dengan terselenggaranya Pemilu di sebuah negara yang rawan konflik adalah sebuah prestasi yang cukup baik. Bahkan presiden Afghanistan Ashraf Ghani menawarkan Taliban untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan menjadi sebuah partai politik.<sup>43</sup>

Perihal Hak Asasi Manusia (HAM) di Afghanistan, negara ini juga memiliki sebuah lembaga bernama Komisi Hak Asasi Manusia Independen Afghanistan (AIHRC). Lembaga tersebut berfungsi untuk melindungi dan mempromosikan HAM

---

<sup>41</sup> Detik.com, "Membangun Demokrasi Di Afghanistan," *Detik.Com*, last modified 2012, <https://news.detik.com/berita/d-2097690/membangun-demokrasi-di-afghanistan>.

<sup>42</sup> Wikipedia, "Daftar Partai Politik Afghanistan," *Wikipedia*, [https://id.melayukini.net/wiki/List\\_of\\_political\\_parties\\_in\\_Afghanistan](https://id.melayukini.net/wiki/List_of_political_parties_in_Afghanistan).

<sup>43</sup> Bbc.com, "Taliban Ditawari Menjadi Partai Politik Dan Ikut Pemilu Afghanistan," *Bbc*, last modified 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43226497>.

di Afghanistan. Meskipun begitu proses menuju penegakan dan perbaikan HAM di Afghanistan tidak sepenuhnya berjalan mulus. Agama resmi yang dipakai di Afghanistan adalah agama Islam. Agama lain masih diperbolehkan untuk menjalankan ritual, akan tetapi tidak diizinkan untuk melakukan dakwah. Semua hukum harus sesuai dengan moralitas Islam, serta presiden dan wakil presiden haruslah beragama Islam. Di Afghanistan, kemurtadan bisa dihukum mati.<sup>44</sup>

Selain itu, *United Nations Assistance Mission In Afghanistan* (UNAMA) juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan HAM bagi masyarakat Afghanistan. UNAMA merupakan lembaga PBB yang fokus bekerja untuk mendamaikan Afghanistan melalui dua bidang kerja, yaitu urusan politik, dan urusan pemulihan serta rekonstruksi. memberikan perhatian kepada masyarakat Afghanistan perihal perlindungan kepada masyarakat sipil, perlindungan bagi perempuan, bantuan terhadap proses rekonsiliasi, dan memberikan perlindungan terhadap para tahanan dari upaya kekerasan. Keterlibatan UNAMA dalam upaya memulihkan kondisi politik di Afghanistan rupanya mampu memancing negara-negara lain untuk bergabung. Negara-negara tersebut seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Jerman, dan lain sebagainya.<sup>45</sup>

Perihal hukum keluarga, Afghanistan sempat mengalami keterpurukan ketika berada di bawah Taliban. Mereka melarang perempuan untuk keluar dari rumahnya. Padahal sebelumnya, Afghanistan telah memiliki aturan yang berkaitan erat dengan hukum keluarga sebagaimana negara Islam lainnya. Mereka mengatur soal mahar dalam pernikahan, perkawinan anak, hukum perceraian (keadilan antara laki-laki dan perempuan), dan lain sebagainya.<sup>46</sup> Meskipun demikian, setelah jatuhnya Taliban, Afghanistan melakukan perubahan dengan mereformasi aturan tentang hukum keluarga dan keterlibatan perempuan ini. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan status perempuan serta memperkuat hak-hak dalam anggota keluarga.

Dalam hal kebebasan pers, Afghanistan mengizinkan adanya kebebasan pers dan kebebasan berekspresi dalam koridor dan batasan hukum Islam dan tidak menyinggung sekte lain. Kebebasan pers dijamin pada 2005 oleh Presiden sementara

---

<sup>44</sup> Wikipedia, "Hak Asasi Manusia Di Afghanistan," *Wikipedia*, [https://id.melayukini.net/wiki/Human\\_rights\\_in\\_Afghanistan#Justice\\_system](https://id.melayukini.net/wiki/Human_rights_in_Afghanistan#Justice_system).

<sup>45</sup> Ahmad Fuadi, "Peran United Nations Assistance Mission In Afghanistan (UNAMA) Dalam Memberikan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Afghanistan Pada Tahun 2009-2012," *Jom Fisip* 1, no. 2 (2014): 15.

<sup>46</sup> Hasbollah Toisuta, "Hukum Keluarga Di Afghanistan," *Tahkim* IX (2013): 38–44.

mereka yaitu Karzai. Meskipun begitu, kebebasan pers di Afghanistan tidak sepenuhnya baik. Masih banyak ketidakadilan yang dirasakan oleh para jurnalis di Afghanistan. Mereka mendapatkan ancaman, serangan, hingga pembunuhan dari pejabat Afghanistan.<sup>47</sup>

#### 4. Demokrasi di Afghanistan

Dalam perkembangannya negara Afghanistan adalah salah satu negara Timur Tengah yang juga memperjuangkan demokrasi. Namun, usaha demokratisasi tersebut rupanya masih mengalami hambatan yang cukup berat. Dalam pemilihan umum tahun 2009 di Afghanistan tercatat masih sangat rendah partisipasi dari para masyarakat Afghanistan. Terdapat dua kemungkinan yang menjadi sebab rendahnya partisipasi masyarakat Afganistan dalam Pemilu tersebut. Pertama adalah karena ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah yang dinilai curang ketika penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, kedua adalah ada ancaman dari kelompok Taliban.<sup>48</sup> Di negara Afghanistan Taliban memang menjadi sebuah momok tersendiri dalam demokratisasi Afghanistan.

Taliban merupakan gerakan Islamis yang sangat konservatif. Mereka mengadopsi faham Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Jamaat Islami di Pakistan. Kelompok Taliban dibentuk pada tahun 1994 mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan Pakistan. Dewan Keamanan PBB mengecam tindakan kelompok ini karena kejahatannya terhadap warga negara Iran dan Afghanistan. Taliban melakukan berbagai aksi pelanggaran HAM di Afghanistan.<sup>49</sup> Dalam pandangan Taliban, dosa dan kemungkaran terjadi karena adanya kesalahan dalam penerapan agama. Taliban membentuk satuan pengamanan yang bertugas untuk penegakan *amar ma'ruf nahi mungkar*.<sup>50</sup> Kelompok Taliban mayoritasnya berasal dari suku Pustun yang merupakan salah satu suku terbesar di Afghanistan, dan Taliban merupakan sebuah pergerakan dari kelompok Sunni muslim.<sup>51</sup> Taliban menjadi kelompok yang sangat berkuasa di Afghanistan, mereka menguasai sekitar 90 hingga 95 persen wilayah

---

<sup>47</sup> Amin Tarzi, "Afghanistan: Mass Media Law Comes Under Scrutiny," last modified 2007, <https://www.rferl.org/a/1074472.html>.

<sup>48</sup> Rizki Nugraha, "Demokrasi Afghanistan Dalam Cobaan," *Www.Dw.Com*, last modified 2010, <https://www.dw.com/id/demokrasi-afghanistan-dalam-cobaan/a-6020532>.

<sup>49</sup> Taufik Adi Susilo, *Ensiklopedia Pengetahuan Dunia Abad 20* (Yogyakarta: Javalitera, 2010), 391.

<sup>50</sup> *Ibid.*, 29.

<sup>51</sup> Sunaryo, "Perubahan Sikap Hamid Karzai Terhadap Taliban Di Afghanistan," 1.

Afghanistan, sebelum akhirnya digempur oleh pesawat tempur Amerika Serikat pada 7 Oktober 2001.<sup>52</sup>

Di awal tahun 2000-an, Afghanistan dianggap sebagai negara yang gagal dalam demokratisasi. Salah satu alasannya adalah karena negara Afghanistan termasuk dalam negara yang paling rentan terjadi konflik. Data tersebut diungkapkan oleh The Guardian pada tahun 2014. Afghanistan bersama empat negara lainnya (Syria, Sudan, Iraq, Somalia) merupakan negara yang rawan akan konflik. Bahkan Afghanistan hanya berada satu tingkat di Atas Syria yang menduduki peringkat paling bawah. Sedangkan yang paling atas adalah Islandia.<sup>53</sup> Dari data tersebut menunjukkan bahwa impian Afghanistan untuk menjadi negara yang demokratis masih menemui jalan yang cukup terjal. Terlebih konflik di Afghanistan adalah konflik yang cukup rumit dan sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, keterlibatan negara-negara lain juga semakin memperkeruh suasana di dalam internal negara Afghanistan.

Faktor lain yang menyebabkan Afghanistan kesulitan untuk bangkit dari konflik dan membentuk sebuah negara yang damai adalah karena kekacauan yang disebabkan oleh Taliban. Meskipun kedigdayaan kelompok tersebut telah usai, akan tetapi gerakan pemberontakan yang mereka lakukan cukup mampu membuat pemerintah Afghanistan mengalami kesulitan untuk mewujudkan keamanan dan kedamaian di negara tersebut. Antara tahun 2006 sampai 2009 pemberontakan yang dilakukan oleh Taliban meningkat drastis sebesar 48,52 persen. Pada 7 Desember 2018, PBB menyampaikan data bahwa tingkat kekerasan di Afghanistan masih tergolong tinggi. Terdapat 2.798 orang terbunuh dan 5.253 mengalami luka dalam sebuah aksi kekerasan yang terjadi di Afghanistan.<sup>54</sup>

Dalam buku *Masa Depan Kebebasan*, Fareed Zakaria menyatakan bahwa satu-satunya faktor dalam mempertahankan dan membangun demokrasi sebuah negara adalah kekayaan. Kekayaan sangat baik untuk perkembangan demokrasi.<sup>55</sup> Namun dalam kenyataannya, ekonomi Afghanistan termasuk yang terpuruk. Dari tahun 2010 hingga 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Afghanistan

---

<sup>52</sup> Rahman, *Afghanistan Di Tengah Arus Perubahan Lamporan Dari Lapangan*, xi–xii.

<sup>53</sup> George Arnett, “Global Peace Index 2014: Every Country Ranked,” *The Guardian*, last modified 2014, 6/29/2021.

<sup>54</sup> Robi Sugara, “Upaya Dan Kontribusi Indonesia Dalam Proses Perdamaian Di Afghanistan Melalui Bina Damai,” *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial* 5 (2021): 33.

<sup>55</sup> Fareed Zakaria, *Masa Depan Kebebasan* (Jakarta: Ina Publikatama, 2004), 77.

selalu minus. Di tahun 2010 -17.9, sempat membaik menyentuh angka -0.4 di tahun 2018, namun kembali terjungkal menjadi -3.4 di tahun 2020.<sup>56</sup> Selain itu tingkat GDP Afghanistan sangatlah rendah. Di tahun 2013 sebesar 660 US\$, 654 US\$ di 2014, dan 615 US\$ di tahun 2015. Hal tersebut menyebabkan Afghanistan menempati peringkat 13 terbawah.<sup>57</sup>

Meskipun demikian, usaha Afghanistan untuk memodernisasi negaranya sudah menempuh jalan yang lurus. Sehingga data-data di atas tidak serta merta dapat dipakai sebagai alasan menilai Afghanistan mundur. Afghanistan adalah negara yang rawan dengan konflik. meskipun begitu usaha untuk binadamai (aktivitas yang dilakukan untuk memulihkan kondidi sebuah negara pasca perang) di Afghanistan terus dilakukan.

Bantuan dari negara luar juga menjadi pertimbangan dalam usaha modernisasi Afghanistan ini. Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk Islam terbesar juga ikut serta dalam proses modernisasi di Afghanistan. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2011, Indonesia menerima kunjungan Ketua Delegasi Parlemen Afghanistan Fazel Haddi Muslimyar. Mereka menyepakati untuk bekerjasama dalam memberikan pelatihan kepada kepolisian Afghanistan. Peran Indonesia berlanjut pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Upaya Indonesia dalam konteks membantu modernisasi dan perdamaian di Afghanistan tertuang dalam beberapa kerjasama dalam bidang ekonomi, kepolisian, anti-narkoba, dan pendidikan. Indonesia memberikan dana hibah kepada Afghanistan untuk membangun masjid, klinik, dan pusat studi Islam. Selain itu, Indonesia juga memberikan kesempatan kepada warga Afghanistan untuk belajar di beberapa Universitas di Indonesia.<sup>58</sup>

## E. KESIMPULAN

Afghanistan memiliki sejarah yang cukup panjang. Sejak masa sebelum masehi, wilayah Afghanistan sudah berperan dalam kemajuan peradaban. Akan tetapi, di abad modern, Afghanistan dihadapkan pada situasi yang kelam. Afghanistan merupakan salah satu wilayah yang rawan konflik. Negara Afghanistan terbentuk dan didirikan oleh Ahmad Shah Durrani pada 1747. Perjalanan politiknya diwarnai dengan berbagai macam

---

<sup>56</sup> Trading Economics, "Trading Economics," *Trading Economics*, <https://id.tradingeconomics.com-afghanistan/government-budget>.

<sup>57</sup> Irza Khurun'in, "Tantangan Binadamai: Kegagalan Demokratisasi Pasca Konflik Sipil Di Afghanistan," *Transformasi* 3 (n.d.): 102.

<sup>58</sup> A N Zaman, "Keterlibatan Pemerintahan Joko Widodo Dalam Upaya Perdamaian Di Afghanistan," *Independen* 1, no. 2 (2020): 101–102, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Independen/article/view/7837>.

persoalan. Dikuasainya Afghanistan oleh Soviet merupakan babak sejarah yang cukup signifikan. Hal itu disebabkan karena terjadi konflik internal yang terjadi di antara kelompok elit Afghanistan. Selain itu, hubungan mereka dengan Pakistan juga tidak kalah penting. Pakistan memiliki hubungan baik dengan Afghanistan terlebih saat kelompok Taliban menguasai pemerintahan Afghanistan. Selain karena Afghanistan dan Pakistan adalah negara tetangga, keduanya juga merupakan negara yang menjunjung tinggi gerakan Islam yang konservatif.

Sebelum kembali dikuasai oleh Taliban, Afghanistan dalam perjalanannya tengah berusaha untuk memodernisasi negaranya ke arah yang lebih baik. Modernisasi dilakukan dalam rangka untuk memajukan negaranya dan memperbaiki berbagai macam sektor. Meskipun begitu, masih terdapat banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, sehingga modernisasi dan demokratisasi di Afghanistan bisa mencapai tingkat yang lebih baik.

Kajian ini mengemukakan proses modernisasi dan demokratisasi di Afghanistan. Modernisasi selalu beriringan dengan perbaikan segala aspek. HAM, gender, kebebasan pers, dan hak minoritas adalah aspek yang penting untuk diperhatikan. Sebagai sebuah negara yang rawan akan konflik, Afghanistan tidak melupakan unsur-unsur tersebut. Kajian ini menjabarkan perjalanan sejarah Afghanistan (sebagai sebuah negara Islam) dalam rangka modernisasi dan demokratisasi sudut pandang politik. Sebuah negara Islam yang memakai sistem demokrasi perlu untuk memperhatikan unsur-unsur dalam demokrasi sebagai upaya memajukan negaranya. Isu HAM, kesetaraan gender, kebebasan pers, dan hak minoritas bisa dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan sebuah negara yang sedang menapaki jalan untuk mencapai cita-cita demokrasinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2019.
- Adi, Sulistiyo. "Mengenal Afghanistan." *Al Jamiah* (1988).
- Afrizal, Jhon. "Gerakan Sosial Politik Islam Dunia." *Sosial Budaya* 9 (n.d.).
- Arnett, George. "Global Peace Index 2014: Every Country Ranked." *The Guardian*. Last modified 2014. 6/29/2021.
- Ashghor, Aly. "Taliban Di Afghanistan: Tinjauan Ideologi, Gerakan Dan Aliansinya Dengan Isis." *Jurnal Keamanan Nasional II*, no. 1 (2021).
- Azam, Abdullah. *Perang Afghanistan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Bbc.com. "Taliban Ditawari Menjadi Partai Politik Dan Ikut Pemilu Afghanistan." *Bbc*. Last modified 2018. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43226497>.
- Bosworth, CE. *Dinasti-Dinasti Islam*. Bandung: Penerbit Mizan, 1993.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Burton, Antoinette. "On the First Anglo-Afghan War, 1839-42: Spectacle of Disaster." *Branch*. Accessed August 9, 2021. [http://www.branchcollective.org/?ps\\_articles=antoinette-burton-on-the-first-anglo-afghan-war-1839-42-spectacle-of-disaster](http://www.branchcollective.org/?ps_articles=antoinette-burton-on-the-first-anglo-afghan-war-1839-42-spectacle-of-disaster).
- Daliman. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Detik.com. "Membangun Demokrasi Di Afghanistan." *Detik.Com*. Last modified 2012. <https://news.detik.com/berita/d-2097690/membangun-demokrasi-di-afghanistan>.
- Economics, Trading. "Trading Economics." *Trading Economics*. <https://id.tradingeconomics.com/afghanistan/government-budget>.
- Fuadi, Ahmad. "Peran United Nations Assistance Mission In Afghanistan (UNAMA) Dalam Memberikan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Afghanistan Pada Tahun 2009-2012." *Jom Fisip* 1, no. 2 (2014): 237–267.
- Ghifari, Ahda Abid. "Dinamika Politik Afghanistan Pada Masa Taliban." Universitas Negeri Yogyakarta, 2001.
- Hadibroto, Iwan. *Perang Afghanistan: Di Balik Perseteruan AS & Taliban*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Ibrahimi, S Yaqub. "Afghanistan 's Political Development Dilemma : The Centralist State Versus a Centrifugal Society" (2019).
- Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. 2nd ed. Yogyakarta: Ombak, 2019.
- Khurun'in, Irza. "Tantangan Binadamai: Kegagalan Demokratisasi Pasca Konflik Sipil Di Afghanistan." *Transformasi* 3 (n.d.).
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Lapidus, Ira M. *Sejarah Sosial Ummat Islam*. Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada, 2000.

- Maley, William. *Taliban Dan Multi Konflik Di Afghanistan*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1999.
- Milia, Jana. “Kebijakan Luar Negri Amerika Serikat Terhadap Kelompok Terorisme Pada Masa Pemerintahan Barack Obama.” *Jom Fisip* 2 (2015).
- Nugraha, Rizki. “Demokrasi Afghanistan Dalam Cobaan.” *Www.Dw.Com*. Last modified 2010. <https://www.dw.com/id/demokrasi-afghanistan-dalam-cobaan/a-6020532>.
- Rahman, Mustafa Abd. *Afghanistan Di Tengah Arus Perubahan Lamporan Dari Lapangan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Roder, Tilmann J. “Complimentarity and Conflict: State, Islamic, and Customary Justice in Afghanistan.” *Journal of Afghan Legal Studies* 2 (2017).
- Sugara, Robi. “Upaya Dan Kontribusi Indonesia Dalam Proses Perdamaian Di Afghanistan Melalui Bina Damai.” *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial* 5 (2021): 27–38.
- Sunaryo, Aditia Yulia Estari. “Perubahan Sikap Hamid Karzai Terhadap Taliban Di Afghanistan.” Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.
- Susilo, Taufik Adi. *Ensiklopedia Pengetahuan Dunia Abad 20*. Yogyakarta: Javalitera, 2010.
- Syarifuddin, H. “Islam Modern Di Afghanistan.” *Istiqra’* 4, no. 1 (2016).
- Tarzi, Amin. “Afghanistan: Mass Media Law Comes Under Scrutiny.” Last modified 2007. <https://www.rferl.org/a/1074472.html>.
- Toisuta, Hasbollah. “Hukum Keluarga Di Afghanistan.” *Tahkim* IX (2013): 34–48.
- Voll, John Obert. *Islam Continuity and Change in The Modern*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Wikipedia. “Daftar Partai Politik Afghanistan.” *Wikipedia*. [https://id.melayukini.net/wiki/List\\_of\\_political\\_parties\\_in\\_Afghanistan](https://id.melayukini.net/wiki/List_of_political_parties_in_Afghanistan).
- . “Hak Asasi Manusia Di Afghanistan.” *Wikipedia*. [https://id.melayukini.net/wiki/Human\\_rights\\_in\\_Afghanistan#Justice\\_system](https://id.melayukini.net/wiki/Human_rights_in_Afghanistan#Justice_system).
- Zakaria, Fareed. *Masa Depan Kebebasan*. Jakarta: Ina Publikatama, 2004.
- Zaman, A N. “Keterlibatan Pemerintahan Joko Widodo Dalam Upaya Perdamaian Di Afghanistan.” *Independen* 1, no. 2 (2020): 95–106. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Independen/article/view/7837>.